

**ANALISIS PENYALURAN KREDIT MIKRO DAN KECIL PADA BEBERAPA
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI WILAYAH JAWA TENGAH**

Analysis of Micro and Small Credits on Microfinance Institutions in Central Java Region

Bayu Nuswantara

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen SatyaWacana, Salatiga
(bnuswan@yahoo.com)

ABSTRAK

Jenis lembaga keuangan mikro sangat bervariasi, baik ditinjau dari sisi kelembagaan, tujuan pendirian, budaya masyarakat, maupun sasaran lainnya. Beberapa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menyalurkan pinjaman dan kredit kepada usaha mikro dan kecil antara lain adalah: koperasi simpan pinjam, bank perkreditan rakyat, BRI Unit, dan beberapa bank umum lainnya. Lembaga ini masih berperan besar bagi unit usaha mikro dan kecil, terutama yang berada di pedesaan. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis penyaluran kredit mikro dan kecil oleh koperasi, bank perkreditan rakyat, BRI Unit, dan bank umum di wilayah Jawa Tengah. Untuk mencapai tujuan ini dilakukan pengambilan data *pool* penyaluran kredit mikro dan kecil di 29 kabupaten di Jawa Tengah periode tahun 2000-2005, serta dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah: jumlah kantor koperasi, jumlah anggota koperasi, jumlah aset koperasi, jumlah giro masyarakat, jumlah pinjaman per nasabah, jumlah nasabah per kantor bank, jumlah kantor bank, jumlah tabungan masyarakat, dan jumlah simpanan deposito berpengaruh nyata terhadap penyaluran kredit mikro dan kecil di wilayah Jawa Tengah.

Kata Kunci: kredit mikro dan kecil, lembaga keuangan mikro

ABSTRACT

Microfinance institutions vary widely, both in terms of the institutional, the purpose, culture, and other targets. Some microfinance institutions (MFIs) that lending and credit to micro and small enterprises are follows: savings and credit cooperatives, rural banks, BRI Unit, and others commercial banks. These MFIs still have strategic role for micro and small enterprises, especially those in rural areas. In generally the objectives of this research is to analyze the micro and small credits by savings and credit cooperatives, rural banks, BRI Unit, and the commercial banks in the region of Central Java. The pool data collection was carried out micro and small credits in 29 regencies in Central Java in 2000-2005 period, and analyzed using multiple regression analysis. The research conclusions are as follows: the number of cooperative office, the number of cooperative members, the number of cooperative assets, the amount of demand deposits, the number of loans each borrower, number of borrowers each bank office, the number of bank offices, the number of public savings, and the number of time deposits have significant influences on micro and small credits in the Central Java Region.

Key Words: small and micro credits, micro finance institutions

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia seperti juga negara-negara sedang berkembang lainnya, secara spesifik memiliki ciri-ciri: (1) Jumlah unit usaha sangat besar dan tersebar di seluruh pelosok pedesaan, (2) Umumnya bersifat padat karya, sehingga berpotensi menumbuhkan kesempatan kerja yang sangat besar, (3) Menggunakan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal setempat, yaitu sumberdaya alam dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang jumlahnya berlebih, (4) Mempunyai kegiatan produksi yang umumnya berbasis pertanian, dan (5) Umumnya membiayai kegiatan produksinya dengan tabungan pribadi, ditambah pinjaman atau bantuan dari kerabat, atau dari pemberi kredit informal, pemasok bahan baku, dan pembayaran di muka dari konsumen (Tambunan, 2009).

Dari sisi modal, kebanyakan usaha mikro dan kecil memulai usahanya dengan modal sendiri dan sebagian kecil yang telah melakukan pendekatan terhadap lembaga keuangan dalam rangka memperoleh pinjaman usahanya. Masih rendahnya tingkat pinjaman usaha mikro dan kecil kepada lembaga keuangan formal disebabkan beberapa permasalahan antara lain: (1) kurangnya aksesibilitas usaha mikro dan kecil kepada lembaga keuangan formal terutama informasi dan persyaratan kredit, (2) tidak adanya agunan kredit, (3) kurangnya kemampuan manajemen keuangan, (4) rendahnya kualitas sumberdaya manusia, dan (5) terbatasnya kompetensi kewirausahaan dan permodalan (Bank Indonesia, 2005).

Kredit mikro dan kecil yang diperuntukkan khusus untuk UMKM yang difasilitasi pemerintah telah lama ada sejak akhir tahun 1960-an, berupa: pola kredit bimas, Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) (Tambunan, 2009). Namun demikian masih banyak usaha mikro dan kecil yang belum terjangkau lembaga keuangan formal, dimana sumber modal usaha mikro dan kecil, terbesar bukan dari lembaga kredit, tetapi dari modal sendiri (BPS, 2006). Kondisi lainnya juga digambarkan bahwa pasar usaha mikro dan kecil yang digarap oleh perbankan baru sekitar 30 persen saja secara nasional, dan 70 persen sisanya, belum tergarap oleh perbankan

nasional (Abdullah, 2006). Hal ini merupakan peluang bagi lembaga keuangan mikro, baik bank maupun non bank untuk terus menggarap usaha mikro dan kecil, terutama usaha yang belum *bankable*.

Angkatan kerja di Jawa Tengah berjumlah sekitar 17 087 649 jiwa atau 51.99 persen jumlah penduduk. Dari total angkatan kerja ini terdapat 15 835 383 jiwa atau 92.67 persen adalah angkatan kerja yang bekerja. Sementara itu dari total angkatan kerja yang bekerja ini, tercatat 2 942 281 jiwa bekerja berusaha sendiri, 3 650 147 jiwa bekerja berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan 405 682 jiwa bekerja berusaha dibantu buruh tetap. Kelompok inilah yang menjadi basis dari unit usaha dan tenaga kerja pada kegiatan usaha mikro dan kecil di Jawa Tengah (BPS Semarang, 2009).

Data Bank Indonesia (2006), mencatat jumlah kantor BRI unit sebanyak 688 kantor dengan 640 255 peminjam dan total pinjaman (*outstanding* Kupedes) sebesar Rp 3 208.23 miliar. Jumlah bank BPR sejumlah 542 kantor dengan tingkat kinerja, Ratio Pinjaman terhadap Simpanan (LDR) sebesar 90.20 persen dan rata-rata Ratio Kecukupan Modal (CAR) sebesar 18.59 persen. Data jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) tercatat 5 920 unit koperasi dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 2 553 086 orang (Kemenkop dan UKM, 2006).

Posisi kredit mikro, kecil dan menengah yang diberikan bank umum (bank pemerintah, swasta nasional, dan swasta asing) dan BPR, menurut plafond kredit di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009, tercatat Rp 69 148 miliar dengan rincian untuk kredit mikro (sampai dengan Rp.50 juta) sebesar Rp 27 165 miliar atau 39.28 persen, untuk kredit kecil (diatas Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta) sebesar Rp 24 451 miliar atau 35.36 persen, dan untuk kredit menengah (diatas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 miliar) sebesar Rp 17 532 miliar atau 25.35 persen (BI Semarang, 2009). Dari total posisi kredit mikro, kecil dan menengah sebesar Rp 69 148 miliar, sebanyak 92.53 persen disalurkan oleh bank umum (pemerintah maupun swasta) sedangkan sisanya 7.47 persen disalurkan melalui BPR.

Menggunakan data hasil survei (BPS, 2006), terlihat bahwa kebutuhan modal bagi usaha

mikro sebanyak 82.41 persen diperoleh dari modal sendiri, 2.86 persen berasal dari pinjaman, dan 14.73 persen berasal dari gabungan modal sendiri dan pinjaman. Sedangkan untuk usaha kecil kebutuhan sumber modal 68.85 persen berasal dari modal sendiri, 1.75 persen berasal dari pinjaman, dan 29.40 persen diperoleh dari gabungan modal sendiri dan pinjaman. Sedangkan untuk asal pinjaman dari usaha mikro 54.54 persen berasal dari bank, dan sisanya 45.46 persen berasal dari koperasi, modal ventura, lembaga non bank, keluarga, perorangan, dan lainnya. Untuk usaha kecil pinjaman diperoleh 15.62 persen dari bank, sisanya 84.38 persen berasal dari koperasi, modal ventura, lembaga non bank, keluarga, perorangan, dan sumber lainnya.

Beberapa fakta yang patut dicatat: (1) kontribusi perbankan dalam menggarap pasar usaha mikro dan kecil secara nasional, baru mencapai angka sekitar 30 persen ini mengindikasikan adanya kesulitan usaha mikro dan kecil untuk memperoleh kredit atau adanya kesenjangan antara pengetahuan UMKM dengan produk dan prosedur perkreditan perbankan, (2) kemampuan daya tahan usaha mikro dan kecil selama pasca krisis ekonomi menunjukkan bahwa usaha mikro khususnya, sangatlah *feasible* secara bisnis tetapi belum *bankable* dalam mengakses kredit.

Berdasarkan uraian diatas maka secara spesifik dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu:

1. Faktor-faktor ekonomi apa sajakah yang mempengaruhi penyaluran kredit mikro dan kecil di wilayah Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap penyaluran kredit mikro dan kecil di wilayah Jawa Tengah?
3. Sejauhmana peranan lembaga keuangan mikro terhadap penyaluran kredit mikro dan kecil di wilayah Jawa Tengah?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi penyaluran kredit mikro dan

kecil pada beberapa lembaga keuangan di wilayah Jawa Tengah.

2. Menganalisis pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap penyaluran kredit mikro dan kecil dari BRI Unit Desa, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan Koperasi Simpan Pinjam di wilayah Jawa Tengah.
3. Menganalisis peranan lembaga keuangan mikro terhadap penyaluran kredit mikro dan kecil di wilayah Jawa Tengah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Pengertian dan Peranan Kredit

Fungsi kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi, perdagangan dan konsumsi, sehingga pada akhirnya akan menaikkan pendapatan masyarakat (Firdaus, 2004).

Adapun jenis-jenis kredit menurut tujuan penggunaannya terdiri dari:

1. Kredit Konsumtif yaitu kredit untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan individu.
2. Kredit Produktif yaitu kredit bertujuan produktif untuk meningkatkan kegunaan (*utility*), terdiri: (a) Kredit Investasi, dan (b) Kredit Modal Kerja, baik yang *revolving*, dan *einmaleg*. (Triandaru dan Budisantoso, 2007).
3. Kredit Likuiditas : yang lebih bertujuan untuk membiayai keperluan atau motif berjaga-jaga (*precautionary motive*).

Tipe atau jenis kredit lainnya menurut jangka waktu terdiri dari, (1) kredit jangka pendek (*short-term credit*), (2) kredit jangka menengah (*intermediate credit*), dan (3) kredit jangka panjang (*long term credit*) (Kamerschen, 1984).

Kredit Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro

Istilah kredit mikro (*microcredit*) erat kaitannya dengan kredit bagi usaha skala mikro dan kecil. Kredit mikro ini merupakan kredit dengan plafon pinjaman kurang dari Rp.50 juta dan terdiri dari kredit modal kerja, kredit investasi

dan kredit konsumsi (Bank Indonesia, 2006). Kredit mikro menjadi populer karena “metode kontroversial” dikembangkan di negara-negara miskin dan juga di negara kaya, karena bank komersial sulit untuk memenuhi permintaan kredit dari rakyat miskin yang tidak memiliki agunan fisik (*physical collateral*) tetapi layak mendapat kredit (*creditworthy*) (Hollis dan Sweetman, 1998).

Konsep kredit mikro merupakan inovasi dari *Grameen bank*, yaitu pinjaman dalam jumlah minimal tanpa agunan kepada rakyat miskin untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan keluarga. Sejak dikembangkan tahun 1976 sistem penyaluran kredit ini telah membuat *Grameen bank* menjadi lembaga penyalur kredit mikro terbesar di Bangladesh (Rahman, 1999).

Ada tiga karakteristik kredit mikro ini sehingga dapat berkembang dan terus berkelanjutan hingga saat ini, yaitu: (1) ditujukan bagi rakyat miskin dalam rangka meningkatkan aktivitas usaha mikro (produksi dan konsumsi), (2) fokus pada kelompok perempuan yang merupakan kontributor utama dalam keluarga, dan (3) memakai tehnik penyaluran kelompok dan pertemuan kelompok, yang potensial membangun modal sosial (Anderson *et al.*, 2002).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat dibedakan tiga jenis, yakni :

1. LKM formal bank : terdiri dari BPR, BRI Unit, dan BKD
2. LKM formal non bank : antara lain Koperasi, LDKP, Pegadaian, dan BKK
3. LKM informal non bank : antara lain BMT, Kelompok Arisan, Simpan-Pinjam, Pelepas Uang, dll, termasuk lembaga-lembaga yang didirikan atas dasar program pemerintah di departemen teknis (Bintoro, 2003).

Klasifikasi Kredit Mikro dan Kecil

Kredit mikro dan kredit kecil, yang digunakan oleh Bank Indonesia berdasarkan kesepakatan bersama Menko Kesra Tahun 2002 (SK, No.11/KEP /MENKO/KESRA/IV/2002 dan No.4/2/KEP.GBI/2002 tanggal 22 April 2002) yang memberikan batasan kredit mikro dan kredit kecil sebagai berikut:

1. Kredit Mikro adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro, baik langsung maupun tidak langsung, yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin dengan kriteria penduduk miskin menurut Badan Pusat Statistik, dengan plafon kredit maksimal Rp 50 juta.
2. Kredit Kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan maksimal Rp 1 miliar per tahun, dengan plafon kredit maksimum sebesar Rp 500 juta.

Berdasarkan batasan kredit mikro dan kredit kecil ini, terlihat ada kaitan yang erat mengelompokkan usaha mikro dan kecil dengan penentuan kriteria kredit mikro dan kecil, yang ditetapkan oleh pemerintah selaku regulator dan Bank Indonesia selaku otoritas moneter dalam menggerakkan sektor riil.

Pengertian Usaha Kecil

Batasan dan kriteria umum tentang usaha kecil biasanya digunakan untuk mengelompokkan usaha untuk tujuan pembangunan sesuai dengan program pemerintah untuk menggerakkan sektor riil (Nuridin, 2007). Menurut UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, batasan usaha di definisikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai mana diatur dalam UU. Yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,

atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan maksimal Rp 2.5 miliar.

Studi Pustaka Terdahulu

Penelitian tentang permintaan kredit pada industri kecil oleh Rachmina (1994), menganalisis permintaan kredit dan mempelajari hubungan pemberian kredit dengan pembentukan modal pada industri kecil di Jawa Barat dan Jawa Timur, menunjukkan bahwa tingkat bunga kredit, omzet usaha, dan jenis bank berpengaruh nyata terhadap permintaan kredit. Kredit juga mampu mendorong pembentukan modal usaha (modal sendiri), aset perusahaan, dan aset keluarga.

Penelitian di wilayah Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah dan kabupaten Boalemo Gorontalo menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui perbankan mikro akan lebih efektif bila implementasinya menerapkan efisiensi biaya, pelayanan nasabah, dan fokus pada target pasar tertentu, sehingga pendapatan riil masyarakat pesisir dapat meningkat. Selain itu diperlukan pendekatan mitra bisnis dan program pendampingan kepada kelompok nelayan agar pelaksanaan *micro banking* berjalan baik (Edy, 2004).

Simanjuntak (1993), melakukan penelitian terhadap 173 BPR di wilayah Bogor, Tangerang, dan Bekasi mendapatkan hasil bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah tersebut telah melakukan aktivitasnya sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dan di dalam pasar keuangan perdesaan. Namun demikian BPR ternyata masih beroperasi dalam skala usaha yang *increasing returns to scale*, ini menunjukkan bahwa BPR masih kurang responsif terhadap bekerjanya mekanisme pasar lembaga keuangan di daerah perdesaan dan pinggiran perkotaan. Salah satu penyebab kurang responsifnya BPR di dalam merespon bekerjanya sistem pasar diperkirakan karena derajat monetisasi di perdesaan masih rendah.

Penelitian tentang kredit Karya Usaha Mandiri (KUM) yang merupakan replika Grameen Bank oleh Syukur (2002) di wilayah Bogor menunjukkan bahwa peserta skim kredit yang

semuanya wanita dari rumahtangga miskin memperoleh dampak positif terhadap ekonomi dan kualitas hidup rumahtangganya. Hal ini karena penyaluran kredit KUM berdampak pada peningkatan pendapatan, pendapatan, simpanan, modal, dan pengeluaran untuk pendidikan peserta skim kredit. Skim KUM telah membuka akses kredit dan pelayanan tabungan bagi rumahtangga miskin, sehingga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dan pemupukan modal.

Usaha Kecil Dan Kebutuhan Kredit

Di Indonesia usaha mikro dan kecil (UMK) menjadi penopang utama kegiatan ekonomi. Kontribusi UMK dalam penyerapan tenaga kerja mencapai 94.59 persen dari seluruh pasar tenaga kerja di Indonesia, sedangkan kontribusi UMK dalam hal jumlah unit usaha di semua sektor ekonomi mencapai 99.91 persen dari total unit usaha di Indonesia (Kemenkop dan UKM, 2009).

Perilaku ekonomi dari usaha kecil sebagai perusahaan (*firm*) memiliki perbedaan dengan perilaku ekonomi dari rumahtangga (*household*). Perusahaan adalah organisasi ekonomi yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan (*profit*) dengan menggunakan sejumlah sumberdaya yang dikuasainya. Sedangkan pada rumahtangga tujuan yang hendak dicapai adalah untuk memaksimalkan kegunaan (*utility*) dengan bertindak rasional dalam mengalokasikan modal dan waktu rumahtangga, dan menggunakan pendapatan untuk konsumsi barang dan jasa (Becker, 1965; Evenson, 1976; Kusnadi, 2005; Fariyanti, 2008).

Pelaku usaha kecil sebagai produsen dengan asumsi dasar fungsi produksi (Henderson dan Quandt, 1980), *memiliki* perilaku ekonomi lebih didasarkan pada usaha untuk mencari keuntungan (laba) maksimum, dan untuk memaksimalkan keluaran serta mengoptimalkan penggunaan faktor produksi. Dalam jangka pendek, keuntungan merupakan selisih antara nilai keluaran dengan nilai masukan variabel, sedangkan dalam jangka panjang keuntungan merupakan selisih antara nilai keluaran dengan total biaya masukan. Menurut Nazar (1980), semua kegiatan produktif usaha kecil dilakukan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan (laba), dengan kendala pada harga relatif masukan dan keluaran,

dan hubungan teknik dari produksi. Langkah yang dilakukan oleh produsen ini secara teori dikenal sebagai optimisasi.

Pada tahap awal kegiatan produksi, usaha kecil berusaha memaksimumkan produksi dengan kendala anggaran (modal) sehingga dicapai titik keseimbangan produsen. Apabila usaha kecil ingin melakukan perluasan usaha (*expansion path*), maka dibutuhkan tambahan anggaran biaya untuk membeli bahan baku (masukan atau *input*). Tambahan anggaran biaya ini bisa didapatkan dengan 2 (dua) cara, yaitu: (1) dari internal berupa akumulasi keuntungan (laba) yang dapat disisihkan, dan (2) dari eksternal berupa kredit atau pinjaman.

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis, hipotesis penelitian adalah: Faktor-faktor ekonomi diduga akan mempengaruhi penyaluran kredit mikro dan kecil dari BRI Unit Desa, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan Koperasi Simpan Pinjam, di wilayah Jawa Tengah.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mencakup seluruh kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, meliputi 29 Kabupaten.

Metoda Pengambilan Contoh dan Pengumpulan Data

Data diperoleh dari data sekunder (*time series*) untuk kondisi tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 selama 6 (enam) tahun dan data primer (*cross-section*) dari 29 kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sehingga didapat data *pool*. Adapun data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Semarang, Bank Indonesia Semarang, Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Perumusan Model

Model ekonometrika ini dalam bentuk persamaan perilaku terdiri 6 (enam) persamaan regresi berganda.

1. Kredit Kupedes dari Bank Rakyat Indonesia-Unit (KBRI) :

$$KBRI = a_{10} + a_{11}SBPK + a_{12}RPN + a_{13}RNU + a_{14}JBRI + a_{15}PDR + U_1 \dots\dots (01)$$

2. Kredit Modal Kerja dari KUK (KMK) di Bank Umum:

$$KMK = a_{20} + a_{21}SBPM + a_{22}JT + a_{23}JG + a_{24}KBRI + a_{25}JNB + U_2 \dots\dots (02)$$

3. Kredit Investasi dan Konsumsi dari KUK (KIKK) di Bank Umum :

$$KIKK = a_{30} + a_{31} SBPI + a_{32} JD + a_{33} JBRI + U_3 \dots\dots\dots (03)$$

4. Kredit Modal Kerja dari Bank Perkreditan Rakyat (KMB) :

$$KMB = a_{40} + a_{41} SBBM + a_{42} JG + a_{43} JBPR + U_4 \dots\dots\dots(04)$$

5. Kredit Investasi dan Konsumsi dari BPR (KIKB) :

$$KIKB = a_{50} + a_{51} SBBI + a_{52} JG + a_{53} JBPR + U_5 \dots\dots\dots (05)$$

6. Pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam (KKSP):

$$KKSP = a_{60} + a_{61} SBSM + a_{62} JKSP + a_{63} JG + a_{64} JAKO + a_{65} AKO + a_{66} JM + U_6 \dots (06)$$

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Keadaan Umum Wilayah Provinsi Penelitian

Jawa Tengah secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota, dengan luas wilayah 3 254 412 hektar. Jumlah penduduk pada tahun 2006 tercatat 32 908 850 jiwa dengan kepadatan sekitar 1 011 jiwa per km².

Luas wilayah kabupaten di Jawa Tengah rata-rata sekitar 100 000 hektar, Kabupaten Cilacap memiliki wilayah paling luas 213 851 hektar dan Kabupaten Sukoharjo memiliki wilayah paling sempit 46 666 hektar. Jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap juga tercatat paling banyak yaitu 1 674 210 jiwa, sedangkan Kabupaten Purworejo tercatat memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 712 003 jiwa. Di bidang ekonomi jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masing-masing kabupaten jumlahnya sangat bervariasi terendah 2 unit BPR di Kabupaten

Purbalingga dan Banjarnegara, dan tertinggi 30 unit BPR di Kabupaten Banyumas dan Kendal. Posisi kredit yang disalurkan dari bank umum yang disalurkan ke masyarakat, tercatat Kabupaten Wonosobo paling rendah dengan posisi kredit Rp 392.21 miliar dan tertinggi di Kabupaten Semarang sebesar Rp 2 733.25 miliar (BPS Semarang, 2006).

Perkembangan Indikator Makro di Provinsi Jawa Tengah

Setelah terjadi krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998, dalam perkembangannya di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2000 beberapa indikator ekonomi menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi yang semakin membaik. Hal menonjol yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah diantaranya adalah berkembangnya peranan lembaga keuangan mikro, baik dari perbankan maupun non perbankan. Pada tahun 2003 jumlah kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit yang ada di 29 kabupaten dan 7 kota, tercatat sebanyak 362 kantor BRI unit atau sekitar 9.1 persen dari 3 982 kantor BRI unit di seluruh Indonesia.

Untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada tahun 2003 tercatat 580 BPR atau sekitar 17.6 persen dari 3 299 BPR yang ada di seluruh Indonesia. Sedangkan lembaga Non BPR pada tahun 2003 tercatat 3 786 unit yang terdiri dari Badan Kredit Desa (BKD) dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP). Untuk memperoleh gambaran tentang peranan lembaga keuangan mikro terhadap perekonomian di Provinsi Jawa Tengah, berikut ini diuraikan gambaran umum perkembangan indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penelitian ini.

Kredit Kupedes BRI Unit

Penyaluran kredit Kupedes dari BRI unit ditujukan untuk melayani masyarakat perdesaan yang membutuhkan modal usaha baik untuk kegiatan di pertanian, industri pengolahan, maupun perdagangan (BI Semarang, 2007).

Saat ini jangkauan (*outreach*) dari BRI unit adalah yang paling luas diantara lembaga bank yang ada. Di Jawa Tengah pada tahun 2005 tercatat 688 kantor BRI unit atau rata-rata setiap kabupaten terdapat 23 kantor BRI unit. Dengan jumlah 545 kecamatan di seluruh Jawa Tengah, maka ada lebih

100 kecamatan memiliki 2 kantor BRI unit, angka akan memberikan keunggulan bagi BRI unit dalam menyalurkan kredit ke nasabah. Total penyaluran kredit Kupedes di Jawa Tengah tahun 2005 mencapai Rp 3.21 triliun dengan jumlah nasabah 640 255 debitor, sehingga rata-rata per nasabah meminjam sekitar Rp 5 000 000. Angka ini menunjukkan tingkat penetrasi pasar kredit yang kuat dari BRI unit di wilayah perdesaan.

Kredit Usaha Kecil

Penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) di Jawa Tengah yang dilakukan perbankan menunjukkan perkembangan sejak tahun 2002 hingga tahun 2005. Sampai dengan tahun 2005 penyaluran KUK tercatat Rp 7.11 triliun, angka ini naik dari tahun 2004 yang mencapai Rp 5.99 triliun atau naik hampir 19 persen.

Kredit Usaha Kecil (KUK) meliputi KUK yang disalurkan oleh bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dengan plafon kredit sampai dengan sejumlah Rp 200 juta mempunyai perkembangan yang prospektif terutama jika dibandingkan dengan keadaan perekonomian setelah krisis ekonomi tahun 1998 yang lalu. Hal ini didukung terus menurunnya tingkat suku bunga kredit dari BPR, sejalan dengan membaiknya perekonomian di Jawa Tengah (BI Semarang, 2007).

Perkembangan kredit untuk kegiatan usaha kecil yang terus bertumbuh di Jawa Tengah ini tidak terlepas dari dua kondisi, pertama kegiatan usaha mikro dan kecil relatif stabil dan tahan terhadap gejolak krisis ekonomi, kedua terus berkembangnya lembaga keuangan (perbankan) yang melayani kegiatan usaha mikro dan kecil dan ini ditandai misalnya oleh bertambahnya jumlah jumlah kantor BRI unit dan kantor BPR. Kondisi ini tentu saja diharapkan akan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan perekonomian yang tercermin dari membaiknya indikator-indikator makro ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Kredit Dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kredit dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dikategorikan sebagai kredit mikro dan kecil kepada masyarakat berdasarkan aktivitas operasionalnya yang berada di wilayah kecamatan

di seluruh kabupaten di Jawa tengah. Jumlah tertinggi penyaluran kredit berada di sektor perdagangan, terjadi di seluruh kabupaten di Jawa Tengah kecuali Kabupaten Grobogan yang penyaluran kredit dari BPR tertinggi berada di sektor pertanian. Angka tertinggi jika dibandingkan dengan keadaan di 28 kabupaten yang lainnya ini, diduga terjadi karena tingginya intensitas penanaman komoditas pangan, tanaman jagung hibrida (BI Semarang, 2007).

Sektor pertanian di Kabupaten Grobogan menunjukkan aktivitas yang tinggi dalam aksesibilitas sumber kredit formal dari perbankan terutama BPR. Jumlah kredit ke sektor pertanian mencapai Rp 54.14 miliar sementara sektor perdagangan menyerap kredit BPR sebesar Rp 40.33 miliar. Hal ini diduga juga karena jumlah BPR di wilayah kecamatan lebih dominan dibandingkan yang ada di ibukota kabupaten, sehingga penyaluran pada kegiatan pertanian baik *on farm* maupun *off farm*, seperti komoditi jagung dan olahannya. Angka tinggi untuk penyaluran kredit di sektor pertanian juga terlihat di Kabupaten Kendal, Pati, Blora, dan Banjarnegara.

Kredit Koperasi Simpan Pinjam

Kredit atau pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dalam kegiatan operasional sehari-hari dikenal sebagai volume usaha koperasi. Jumlah kredit yang menggambarkan volume usaha koperasi simpan pinjam ini pada umumnya dari tahun ke tahun sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 terus meningkat. Peningkatan ini cukup merata di 29 Kabupaten di Jawa Tengah

Di Kabupaten Cilacap yang merupakan salah satu kabupaten dengan penduduk terbanyak dan wilayah terluas di Jawa Tengah, kenaikan volume usaha KSP dari tahun 2001 sampai tahun 2005 meningkat lebih dari 200 persen, dari angka Rp 53.02 miliar naik menjadi Rp 121.28 miliar. Pertumbuhan volume usaha ini juga hampir sama terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas yang merupakan kabupaten tetangga. Angka kenaikan volume usaha KSP paling menonjol terjadi di Kabupaten Grobogan, meningkat lebih 500 persen selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari Rp 44.31 miliar pada tahun 2001 naik menjadi Rp 245.65 di tahun 2005. Kenaikan ini menunjukkan aktivitas operasional koperasi simpan pinjam di wilayah

tersebut sangat dinamis. Kenaikan yang tinggi ini bila disertai tingkat pengembalian pinjaman yang lancar tentu akan membuat kenaikan pada nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima anggota koperasi (Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kredit Kupedes dari Bank Rakyat Indonesia Unit (BRI Unit)

Hasil pendugaan parameter persamaan Kredit Kupedes dari BRI Unit (KBRI), menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9379 dan signifikan pada taraf nyata (α) 10 persen yang ditunjukkan nilai Prob > F 0.0001. Ini menunjukkan 93.79 persen variasi dari variabel endogen KBRI dijelaskan oleh variabel-variabel penjelas di dalam persamaan Kredit Kupedes dari BRI-Unit dan signifikan pada taraf nyata (α) 10 persen.

Hasil pendugaan parameter secara parsial menunjukkan bahwa Kredit Kupedes dari BRI Unit (KBRI), dipengaruhi secara nyata oleh Jumlah Pinjaman per Nasabah BRI Unit (RPN), Jumlah Nasabah per Kantor BRI Unit (RNU) dan Jumlah Kantor BRI Unit (JBRI), hubungan ini ditunjukkan masing-masing dengan koefisien elastisitas sebesar 1.032, 0.970, dan 1.021. Nilai ini menunjukkan perkembangan kredit usaha pedesaan yang disalurkan oleh BRI-Unit telah dikelola dengan baik, sehingga variabel nasabah dan internal bank mempunyai pengaruh yang signifikan. Untuk Suku Bunga Kredit Konsumsi dari Bank Umum Milik Pemerintah (SBPK), dan Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian (PDRB1) tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap Kredit Kupedes dari BRI Unit (KBRI).

Hasil lainnya adalah jumlah nasabah BRI Unit yang mampu mengakses kredit kupedes yang merupakan produk utama BRI Unit jumlahnya terus meningkat, demikian pula pinjaman per nasabah BRI Unit juga meningkat. Ini menunjukkan bahwa skema kredit kupedes telah mampu menjangkau dan memberikan dampak yang positif terhadap lapisan masyarakat menengah ke bawah di pedesaan.

Tabel 1. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Kupedes dari BRI Unit

No	Variabel	Parameter Dugaan	Prob > t	Elastisitas
1. Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI (KBRI)				
1	Intersep	-152 300 000	0.0001	
2	Suku Bunga Konsumsi (SBPK)	42 825	0.2690	0.0219
3	Jumlah Pinjaman /Nasabah (RPN)	20 762	0.0001*	1.0332
4	Jumlah Nasabah /BRI Unit (RNU)	84 161	0.0001*	0.9698
5	Jumlah BRI Unit (JBRI)	3 319 319	0.0001*	1.0211
6	PDRB Pertanian (PDRB1)	-0.0018	0.3870	-0.0214
$R^2 = 0.9379$		F Hitung = 507.20	Prob > F = 0.0001	

Keterangan: * = Parameter dugaan berbeda nyata pada taraf nyata (α) 0.10

Kredit Usaha Kecil dari Bank Umum

Hasil pendugaan parameter persamaan Kredit Modal Kerja dari KUK Bank Umum (KMK), menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.5172. Hasil pendugaan parameter secara parsial menunjukkan bahwa Kredit Modal Kerja dari KUK Bank Umum (KMK) dipengaruhi secara nyata oleh Jumlah Tabungan Masyarakat (JT), Jumlah Giro di Bank Umum (JG), Kredit Kupedes dari BRI Unit (KBRI) dan Jumlah Nasabah Peminjam di BRI-Unit (JNB), hubungan ini ditunjukkan dengan nilai koefisien elastisitas 0.3540, -0.1314, 0.9771 dan -0.4000. Hal ini menunjukkan apabila JT dan KBRI bertambah 10 persen, maka KMK akan mengalami kenaikan 3.540 persen dan 9.771 persen. Sedangkan apabila JG dan JNB bertambah 10 persen, maka KMK akan berkurang 1.314 persen dan 4.000 persen.

Hasil pendugaan parameter persamaan Kredit Investasi dan Konsumsi dari KUK Bank Umum (KIKK), menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.1214. Hasil pendugaan parameter secara parsial menunjukkan bahwa Kredit Investasi dan Konsumsi dari KUK Bank Umum (KIKK) dipengaruhi secara nyata oleh Jumlah Deposito Masyarakat di Bank Umum (JD) dan Jumlah Kantor BRI Unit (JBRI), hubungan ini cukup elastis yang ditunjukkan dengan koefisien elastisitas sebesar 0.2451 dan sebesar 0.9074. Hal ini menunjukkan bahwa apabila JD dan JBRI bertambah sebesar 10 persen, maka KIKK akan mengalami kenaikan sebesar 2.451 persen dan 9.074 persen. Jumlah Kantor BRI Unit (JBRI) mempunyai pengaruh yang responsif terhadap Kredit Investasi dan Konsumsi dari KUK, ini menunjukkan adanya kontribusi yang besar dari JBRI terhadap KUK.

Tabel 2. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan KUK dari Bank Umum

No	Variabel	Parameter Dugaan	Prob > T	Elastisitas
1. Kredit Modal Kerja dari KUK (KMK)				
1	Intersep	46 048 801	0.0350	
2	Suku Bunga Modal Kerja (SBPM)	-333 428	0.2763	-0.0766
3	Jumlah Tabungan (JT)	0.1806	0.0001*	0.3540
4	Jumlah Giro Masyarakat (JG)	-0.2748	0.0646*	-0.1314
5	Kredit Kupedes dari BRI (KBRI)	2.1595	0.0001*	0.9771
6	Jumlah Nasabah BRI Unit (JNB)	-3 279.21	0.0178*	-0.4000
		$R^2 = 0.5172$	F Hitung = 35.99	Prob > F = 0.0001
2. Kredit Investasi dan Konsumsi dari KUK (KIKK)				
1	Intersep	-10 250 000	0.5054	
2	Suku Bunga Investasi (SBPI)	159 540	0.6645	0.1154
3	Jumlah Simpanan Deposito (JD)	0.0545	0.0004*	0.2451
4	Jumlah BRI Unit (JBRI)	1 498 967	0.0007*	0.9074
		$R^2 = 0.1214$	F Hitung = 7.83	Prob > F = 0.0001

Keterangan: * = Parameter dugaan berbeda nyata pada taraf nyata (α) 0.10

Sedangkan Suku Bunga Kredit Modal Kerja dari Bank Umum Milik Pemerintah (SBPM) dan Suku Bunga Kredit Investasi dari Bank Umum Milik Pemerintah (SBPI), masing-masing tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap Kredit Modal Kerja dari KUK Bank Umum (KMK) dan Kredit Investasi dan Konsumsi dari KUK Bank Umum (KIKK).

Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan tidak berpengaruhnya suku bunga kredit SBPM dan SBPI terhadap KMK dan KIKK, (1) tingkat suku bunga kredit modal kerja dan kredit investasi dari bank-bank umum milik pemerintah pada periode tahun 2000-2005 cukup

tinggi dan berfluktuasi, dimana pada tahun 2005 rata-rata suku bunga kredit modal kerja dan kredit investasi bank pemerintah besarnya antara 25 persen sampai dengan 40 persen per tahun, (2) penyerapan kredit oleh masyarakat dipengaruhi juga faktor lain diluar tingkat bunga kredit, terutama pada periode tahun 2000-2005 yang mulai membaik, sehingga tingkat bunga kredit yang tinggi tidak menghalangi penyerapan kredit oleh masyarakat.

Kredit dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Hasil pendugaan parameter persamaan Kredit Modal Kerja dari BPR (KMB) dan

persamaan Kredit Investasi dan Konsumsi dari BPR (KIKB), menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.3253 dan sebesar 0.2118. Hasil pendugaan parameter secara parsial menunjukkan bahwa Kredit Modal Kerja dari BPR (KMB) serta Kredit Investasi dan Konsumsi dari BPR (KIKB) dipengaruhi secara nyata oleh Jumlah Kantor BPR (JBPR), hubungan ini cukup

elastis yang ditunjukkan dengan koefisien elastisitas sebesar 1.2748 dan sebesar 0.8341. Hal ini menunjukkan bahwa apabila JBPR bertambah sebesar 10 persen, maka KMB) dan KIKB akan mengalami kenaikan sebesar 12.748 persen dan 8.341 persen.

Tabel 3. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Kredit dari BPR

No	Variabel	Parameter Dugaan	Prob > t	Elastisitas
1. Kredit Modal Kerja dari BPR (KMB)				
1	Intersep	1 110 252	0.9571	
2	Suku Bunga Modal Kerja (SBBM)	-337 994	0.4230	-0.3230
3	Jumlah Giro Masyarakat(JG)	0.01306	0.7431	0.0233
4	Jumlah Kantor BPR (JBPR)	3 123 809	0.0001*	1.2748
		$R^2 = 0.3253$	F Hitung = 27.32	Prob > F = 0.0001
2. Kredit Investasi dan Konsumsi dari BPR (KIKB)				
1	Intersep	14 892 866	0.1565	
2	Suku Bunga Investasi (SBBI)	-359 913	0.0304*	-0.5049
3	Jumlah Giro Masyarakat (JG)	0.0708	0.0400*	0.1841
4	Jumlah Kantor BPR (JBPR)	1 403 134	0.0001*	0.8341
		$R^2 = 0.2118$	F Hitung = 15.23	Prob > F = 0.0001

Keterangan: * = Parameter dugaan berbeda nyata pada taraf nyata (α) 0.10

Untuk hasil pendugaan parameter secara parsial lainnya menunjukkan bahwa Kredit Investasi dan Konsumsi dari BPR (KIKB) dipengaruhi secara nyata oleh Suku Bunga Kredit Investasi dari BPR (SBBI), dan Jumlah Giro Masyarakat di Bank Umum (JG), dengan nilai koefisien elastisitas sebesar -0.5049, dan sebesar 0.1841. Hal ini menunjukkan apabila SBBI turun sebesar 10 persen, maka KIKB akan mengalami kenaikan sebesar 5.049 persen. Sedangkan apabila JG bertambah sebesar 10 persen, maka KIKB hanya akan mengalami kenaikan sebesar 1.841 persen, hubungan yang tidak elastis ini menunjukkan kecilnya pengaruh simpanan giro di bank umum terhadap penyaluran kredit kecil oleh bank perkreditan rakyat

Pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam

Hasil pendugaan parameter persamaan Pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam (KKSP), menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.6188. Hasil pendugaan parameter secara parsial menunjukkan bahwa Pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam (KKSP), dipengaruhi secara nyata positif oleh Jumlah Giro Masyarakat di Bank Umum (JG), Jumlah Anggota Koperasi Simpan Pinjam (JAKO) dan Jumlah Aset Koperasi Simpan Pinjam (AKO), hubungan ini ditunjukkan masing-masing dengan koefisien elastisitas sebesar 0.1240, 0.3918, dan 0.7777. Hal ini menunjukkan jika JG, JAKO, dan AKO bertambah 10 persen, maka KKSP, akan mengalami kenaikan masing-

masing 1.240 persen, 3.918 persen, dan 7.777 persen.

Tabel 4. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Pinjaman dari KKSP

No	Variabel	Parameter Dugaan	Prob > t	Elastisitas
1. Pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam (KKSP)				
1	Intersep	727.345	0.9383	
2	Suku Bunga Modal Kerja (SBSM)	81.3163	0.6677	0.0514
3	Jumlah Kospin (JKSP)	-95.9778	0.0015*	-0.3440
4	Jumlah Giro Masyarakat (JG)	0.000088	0.0115*	0.1240
5	Jumlah Anggota Koperasi (JAKO)	0.2906	0.0001*	0.3918
6	Jumlah Aset Koperasi (AKO)	1.0647	0.0001*	0.7777
7	Jumlah Modal Koperasi (JMK)	-0.0472	0.8509	-0.0145
R ² = 0.6188		F Hitung = 45.18	Prob > F = 0.0001	

Keterangan: * = Parameter dugaan berbeda nyata pada taraf nyata (α) 0.10

Sedangkan apabila JKSP bertambah 10 persen, maka pinjaman KKSP, akan berkurang 3.440 persen. Hal ini mengindikasikan masih banyaknya unit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang tidak aktif dalam menyalurkan pinjaman sehingga jumlah KSP yang aktif di beberapa kabupaten jumlahnya menurun, sedangkan jumlah pinjaman dari KSP dari tahun 2000-2005 terus meningkat. Untuk SBSM dan JMK, tidak memiliki pengaruh nyata terhadap Pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam (KKSP), namun SBSM memiliki tanda parameter dugaan yang positif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil estimasi model dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penting dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi penyaluran pinjaman atau kredit mikro dan kecil, meliputi: jumlah kantor koperasi, jumlah anggota koperasi, jumlah aset koperasi, jumlah giro masyarakat, jumlah pinjaman per nasabah, jumlah nasabah per kantor bank, jumlah kantor bank, jumlah tabungan masyarakat, dan jumlah simpanan deposito.
2. Jumlah pinjaman per nasabah, jumlah nasabah peminjam per kantor BRI Unit, dan jumlah BRI Unit berpengaruh nyata terhadap penyaluran kredit umum pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit.
3. Jumlah tabungan, jumlah giro masyarakat, kupedes dari BRI Unit, jumlah nasabah peminjam per kantor BRI Unit berpengaruh nyata terhadap penyaluran kredit modal kerja dari bank umum, sedangkan jumlah simpanan deposito dan jumlah kantor BRI Unit

- berpengaruh nyata terhadap penyaluran kredit investasi dan konsumsi dari bank umum.
4. Jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berpengaruh nyata terhadap penyaluran kredit modal kerja dari BPR, sedangkan suku bunga kredit investasi, jumlah giro masyarakat, dan jumlah kantor BPR berpengaruh nyata terhadap penyaluran kredit investasi dan konsumsi dari BPR.
 5. Jumlah kantor koperasi simpan pinjam, jumlah anggota koperasi, jumlah aset koperasi, dan jumlah giro masyarakat berpengaruh nyata terhadap penyaluran pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
 6. Pinjaman dari KSP, kredit umum pedesaan dari BRI Unit, dan kredit modal kerja, kredit investasi dan konsumsi dari bank umum, serta kredit modal kerja, kredit investasi dan konsumsi dari bank perkreditan rakyat, mempunyai kontribusi dalam menyalurkan kredit mikro dan kecil di wilayah Jawa Tengah.

Saran Kebijakan

Dari beberapa hasil temuan dalam penelitian ini, ada implikasi kebijakan yang dapat dimunculkan.

1. Untuk terus mencapai dan menjaga pertumbuhan kredit untuk usaha kecil oleh BRI-unit dan bank umum, BPR, dan KSP, perlu didorong pendirian dan pembukaan kantor bank cabang dan unit bank, dan kantor koperasi simpan pinjam di seluruh kecamatan sehingga mampu menjangkau dan memberikan dampak kepada usaha kecil yang telah *feasible* tapi belum *bankable*, serta melayani hingga lapisan masyarakat bawah di pedesaan.
2. Saran penelitian lanjutan agar dilakukan penelitian tentang peranan lembaga keuangan mikro terhadap penyaluran kredit mikro dan kecil, dengan membuat disagregasi berdasarkan karakteristik wilayah pedesaan dan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B. 2006. Perbankan Sepatutnya Lebih Serius Garap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kompas, 10 Maret 2006.
- Anderson, C.L., A. Locker and R. Nugent. 2002. Microcredit, Social Capital, and Common Pool Resources. *World Development Journal*, 30(1): 29-42.
- _____. 2007. Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007. Badan Pusat Statistik, Semarang.
- _____. 2009. Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2009. Badan Pusat Statistik, Semarang.
- Baker, C.B. 1968. Credit in the Production Organization of the Firm. *American Journal of Agricultural Economics*, 50(3). 507-520.
- Bank Indonesia. 2005. Hasil Penelitian Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Bank Indonesia, Jakarta.
- _____. 2006. Laporan Perekonomian Indonesia 2006. BI Jakarta.
- Bank Indonesia Semarang. 2008. Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Tengah: Profil UMKM Peserta Jateng Fair 2008. Bank Indonesia, Semarang.
- Becker, G.S. 1976. *The Economic Approach to Human Behavior*. The University of Chicago Press, Chicago.
- Bintoro, B. 2003. Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam Penanggulangan Kemiskinan dalam Kemiskinan dan Keuangan Mikro. Gema-PKM, Jakarta.
- Edy, H. 2004. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Perbankan Mikro. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, IPB, Bogor.
- Evenson, R.E. 1976. On The New Household Economics. *Journal of Agricultural Economics and Development*, 6 (1): 87-107.
- Fariyanti, A. 2008. Perilaku Ekonomi Rumahtangga Petani Sayuran dalam Menghadapi Risiko Produksi dan Harga Produk di Kecamatan Pangalengan

- Kabupaten Bandung. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, IPB, Bogor.
- Firdaus, H.R. 2004. Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi. Alfabeta, Bandung.
- Henderson, J.M. and R.E. Quandt. 1980. Microeconomics Theory, A Mathematical Approach. Third Edition. McGraw-Hill International Company, Tokyo.
- Hollis, A. and A. Sweetman. 1998. Microcredit: What Can We Learn from the Past? World Development Journal, 26(10): 34-56.
- Kamerschen, D. 1984. Money and Banking. Eighth Edition. South-Western Publishing, Cincinnati, Ohio.
- Kemenkop dan UKM. 2006. Statistik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun 2004-2005. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta.
- _____. 2009. Statistik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun 2007-2008. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta.
- Koutsoyiannis, A. 1977. Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometric Methods. Second Edition. The Macmillan Press Ltd, London.
- Kuntjoro. 1983. Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Kembali Kredit Bimas Padi: Studi Kasus di Kabupaten Subang Jawa Barat. Disertasi Doktor. Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Kusnadi, N. 2005. Perilaku Ekonomi Rumahtangga Petani dalam Pasar Persaingan Tidak Sempurna di Beberapa Provinsi di Indonesia. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Nazar, F. 1990. Ekonomi Miro Untuk Negara Sedang Berkembang: Teori, Aplikasi dan Kebijakan, Suatu Pendekatan Matematika. UI Press Jakarta.
- Nuridin, A. 2007. Membangun Bank UMKM : Concepts and Better Practices. IRPA, Jakarta.
- Pindyck, R.S. and D.L. Rubinfeld. 2001. Microeconomics. Fifth Edition. Prentice-Hall Inc. Upper Saddle River, New Jersey.
- Rachmina, D. 1994. Analisis Permintaan Kredit pada Industri Kecil: Kasus Jawa Barat dan Jawa Timur. Tesis Magister. Sekolah Pascasarjana, IPB, Bogor.
- Rahman, A. 1999. Micro-credit Initiatives for Equitable and Sustainable Development: Who Pays? World Development Journal, 27(1): 42-61.
- Simanjuntak, J.M. 1993. Analisis Skala Usaha, Fungsi Permintaan Input dan Fungsi Penawaran Output Bank Perkreditan Rakyat. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- _____. 1997. Pendekatan Kuantitatif dalam Agribisnis. Mimbar Sosek, Journal of Agricultural and Resource Socio-Economics, 10(1): 48-63.
- Syukur, M. 2002. Analisis Keberlanjutan dan Perilaku Ekonomi Peserta Skim Kredit Rumahtangga Miskin. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Tambunan, T. 2009. UMKM di Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Triandaru, S dan T. Budisantoso. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

LAMPIRAN

Hasil Estimasi Persamaan Regresi Berganda dengan Menggunakan Software SAS/ETS ver.9.2

1. Persamaan Kredit Kupedes dari Bank Rakyat Indonesia-(BRI-Unit) : KBRI

The SAS System						
The SYSLIN Procedure						
Two-Stage Least Squares Estimation						
Model		KBRI				
Dependent Variable		KBRI				
Label		KBRI				
Analysis of Variance						
		Sum of	Mean			
Source	DF	Squares	Square	F Value	Pr > F	
Model	5	2.22E17	4.439E16	507.20	<.0001	
Error	168	1.47E16	8.752E13			
Corrected Total	173	2.366E17				
Root MSE		9355371.18	R-Square	0.93787		
Dependent Mean		75249350.1	Adj R-Sq	0.93602		
Coeff Var		12.43249				
Parameter Estimates						
Variable	Parameter	Standard	Variable			
	DF	Estimate	Error	t Value	Pr > t	Label
Intercept	1	-1.523E8	6294598	-24.19	<.0001	Intercept
SBPK	1	42825.05	38613.95	1.11	0.2690	SBPK
RPN	1	20761.97	885.4871	23.45	<.0001	RPN
RNU	1	84160.61	3724.288	22.60	<.0001	RNU
JBRI	1	3319319	103263.0	32.14	<.0001	JBRI
PDRB1	1	-0.00178	0.002054	-0.87	0.3870	PDRB1

2. Persamaan Kredit Usaha Kecil untuk Modal Kerja dari Bank Umum: KMK

The SAS System

The SYSLIN Procedure

Two-Stage Least Squares Estimation

Model KMK

Dependent Variable KMK

Label KMK

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	5	9.822E17	1.964E17	35.99	<.0001
Error	168	9.171E17	5.459E15		
Corrected Total	173	1.919E18			

Root MSE 73883341.1 R-Square 0.51715

Dependent Mean 166300776 Adj R-Sq 0.50278

Coeff Var 44.42754

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > t	Label
Intercept	1	46048801	21665685	2.13	0.0350	Intercept
SBPM	1	-333428	305291.0	-1.09	0.2763	SBPM
JT	1	0.180607	0.045637	3.96	0.0001	JT
JG	1	-0.27478	0.147727	-1.86	0.0646	JG
KBRI	1	2.159456	0.356552	6.06	<.0001	KBRI
JNB	1	-3279.21	1370.381	-2.39	0.0178	JNB

3. Persamaan Kredit Usaha Kecil untuk Investasi dan Konsumsi dari Bank Umum: KIKK

The SAS System

The SYSLIN Procedure

Two-Stage Least Squares Estimation

Model KIKK

Dependent Variable KIKK

Label KIKK

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	3	4.12E16	1.373E16	7.83	<.0001
Error	170	2.981E17	1.753E15		
Corrected Total	173	3.393E17			
Root MSE		41873966.5	R-Square	0.12144	
Dependent Mean		38240379.3	Adj R-Sq	0.10594	
Coeff Var		109.50196			

Parameter Estimates

Variable	Parameter DF	Standard Estimate	Error	t Value	Pr > t	Label
Intercept	1	-1.025E7	15355851	-0.67	0.5054	Intercept
SBPI	1	159540.1	367217.4	0.43	0.6645	SBPI
JD	1	0.054484	0.014956	3.64	0.0004	JD
JBRI	1	1498967	435335.1	3.44	0.0007	JBRI

4. Persamaan Kredit Modal Kerja dari Bank Perkreditan Rakyat: KMB

The SAS System
The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation
Model KMB
Dependent Variable KMB
Label KMB

Analysis of Variance

Source	Sum of		F Value	Pr > F
	DF	Squares		
Model	3	8.704E16	27.32	<.0001
Error	170	1.805E17		
Corrected Total	173	2.684E17		
Root MSE		32587653.8	R-Square	0.32531
Dependent Mean		44572298.4	Adj R-Sq	0.31340
Coeff Var		73.11190		

Parameter Estimates

Variable	DF	Standard		Variable		
		Estimate	Error	t Value	Pr > t	Label
Intercept	1	1110252	20605046	0.05	0.9571	Intercept
SBBM	1	-337994	420865.1	-0.80	0.4230	SBBM
JG	1	0.013063	0.039793	0.33	0.7431	JG
JBPR	1	3123809	378009.1	8.26	<.0001	JBPR

5. Persamaan Kredit Investasi dan Konsumsi dari Bank Perkreditan Rakyat: KIKB

```

The SAS System
The SYSLIN Procedure
Two-Stage Least Squares Estimation
Model          KIKB
Dependent Variable  KIKB
Label          KIKB
Analysis of Variance
Sum of      Mean
Source      DF  Squares  Square  F Value  Pr > F
Model       3  3.422E16  1.141E16  15.23  <.0001
Error      170  1.273E17  7.49E14
Corrected Total  173  1.609E17
Root MSE    27367486.2  R-Square    0.21184
Dependent Mean  30597724.8  Adj R-Sq    0.19793
Coeff Var    89.44288
Parameter Estimates
Variable      Parameter  Standard      Variable
DF  Estimate  Error  t Value  Pr > |t|  Label
Intercept    1  14892866  10463210  1.42  0.1565  Intercept
SBBI         1  -359913  164848.1  -2.18  0.0304  SBBI
JG           1  0.070804  0.034203  2.07  0.0400  JG
JBPR        1  1403134  316914.8  4.43  <.0001  JBPR

```

6. Persamaan Kredit / Pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam: KKSP

The SAS System						
The SYSLIN Procedure						
Two-Stage Least Squares Estimation						
Model KKSP						
Dependent Variable KKSP						
Label KKSP						
Analysis of Variance						
		Sum of	Mean			
Source	DF	Squares	Square	F Value	Pr > F	
Model	6	1.871E11	3.118E10	45.18	<.0001	
Error	167	1.153E11	6.9022E8			
Corrected Total	173	2.981E11				
Root MSE		26271.9478	R-Square	0.61877		
Dependent Mean		56463.0402	Adj R-Sq	0.60508		
Coeff Var		46.52946				
Parameter Estimates						
	Parameter	Standard				Variable
Variable	DF	Estimate	Error	t Value	Pr > t	Label
Intercept	1	727.3453	9382.122	0.08	0.9383	Intercept
SBSM	1	81.31633	189.0656	0.43	0.6677	SBSM
JKSP	1	-95.9778	29.65238	-3.24	0.0015	JKSP
JG	1	0.000088	0.000034	2.56	0.0115	JG
JAKO	1	0.290603	0.069020	4.21	<.0001	JAKO
AKO	1	1.064676	0.133988	7.95	<.0001	AKO
JMK	1	-0.04724	0.250890	-0.19	0.8509	JMK